

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kemunculan virus baru pada akhir tahun 2019 kemarin, menyebabkan dampak yang sangat besar kepada berbagai sektor kehidupan. Bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, namun juga sangat memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat hampir di seluruh dunia terutama di Indonesia. Ditambah lagi dengan langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menekan angka penyebaran virus dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa pemerintah daerah yang tentunya memperparah berbagai aspek karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas di bidang ekonomi, aktivitas di bidang pendidikan, dan aktivitas di bidang sosial lainnya.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung. Lurah Ciroyom menyatakan bahwa “lumpuhnya pada seluruh sektor baik disektor ekonomi, pendidikan, kehidupan beragama, sosial budaya dan lain-lain” (Agus Firmansyah, wawancara, 9 November 2021 di Pasar Ciroyom)

Masyarakat Kelurahan Ciroyom sangat merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini, Dampak yang juga dirasakan oleh masyarakat pada Kelurahan Ciroyom juga antara lain seperti sempat terjadinya Pasar Tumbang

akibat PSBB, peningkatan pengangguran pada masyarakat, tingkat kemiskinan meningkat, kesejahteraan sosial menurun, bahkan Lurah Ciroyom juga menyatakan banyak dari adanya pemohon surat keterangan ahli waris yang ketika di interview beberapanya ternyata banyak warga yang sampai menjual rumah demi keberlangsungan hidupnya. Hal ini tentunya sangatlah miris dan harus ada penanganan agar kesejahteraan masyarakat kembali meningkat dan tidak ada lagi masyarakat yang sampai harus menjual rumah untuk pemenuhan kehidupannya sehari-hari.

Setiap wilayah pasti selalu memiliki permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi didaerahnya masing-masing. Bahkan jauh sebelum adanya Covid-19, permasalahan yang ada di masyarakat sudah cukup kompleks dan membutuhkan banyaknya pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat. Perubahan dinamis yang terjadi ditengah masyarakat sebenarnya dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama saat pengambilan keputusan untuk memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Wali Kota Bandung Periode 2013-2018 yaitu Ridwan Kamil berhasil melahirkan Program yang di harapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada, yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) pada tanggal 19 Maret 2015. Program ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.

PIPPK sempat menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal oleh model kebijakan sebelumnya, sehingga implementasi PIPPK juga harus disesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan dan kebermanfaatan bagi masyarakat di kewilayahan. Sampai saat ini PIPPK juga masih menjadi salah satu program unggulan Kota Bandung yang mana masyarakat dapat secara langsung turut andil dalam merumuskan, memformulasikan dan merancang suatu pembangunan atau pemberdayaan yang akan diselenggarakan diwilayahnya masing-masing (*Bottom-Up*).

Kemunculan Covid-19 di Indonesia mengubah prioritas baru dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Berdasarkan intruksi edaran Wali Kota Bandung 2020 berkaitan dengan dukungan penanganan Covid-19 bahwa adanya pengalihan anggaran PIPPK sebesar 50% untuk penanganan Covid-19 hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu nomor 119/2813/SJ, 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

Besarnya dampak dari adanya Covid-19, PIPPK yang merupakan salah satu program unggulan Kota Bandung diyakini dapat membantu dalam mengurangi permasalahan yang ada pada masyarakat di setiap wilayah secara merata. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, PIPPK merupakan salah satu dukungan pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan pada lingkup wilayah dan tentu sangatlah bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Lurah Ciroyom, penanganan Covid-19 di Kelurahan Ciroyom pada pelaksanaan pengembangan masyarakat yang sudah dilaksanakan antara lain seperti sosialisasi mengenai Covid-19, adanya kegiatan support pangan untuk warga yang sedang isolasi mandiri selama 14 hari, Program Sabandung, kemudian adanya pembagian sembako untuk meringankan beban warga masyarakat sedikitnya untuk memenuhi kebutuhan makan, pemenuhan air minum dll, diadakan gebyar vaksin ke-1 dan ke-2 yang sudah dilaksanakan masing-masing 2 gelombang, gelombang satu dilaksanakan di SMP Negeri 41 Bandung dengan sasaran hampir 1000 jiwa dengan sasaran usia remaja 12-17 tahun. Kemudian gelombang kedua dilaksanakan di Gedung Pasar Andir dengan sasarannya kurang lebih 2000 sasaran untuk usia dewasa. Kemudian pembelian-pembelian alat semprot desinfektan, alat pencuci tangan, pembagian masker gratis dll. (Agus Firmansyah, wawancara, 9 November 2021 di Pasar Ciroyom)

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari adanya Covid-19 ini. Namun suatu kebijakan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan efektif jika didalamnya terdapat partisipasi dan peran aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat ialah bentuk dari keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan evaluasi program. Fung dan Wright menyatakan bahwa partisipasi masyarakat membuat keadaan menjadi lebih partisipatori, adil, dan akuntabel (Sunarto 2009).

PIPPK dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi atau keterlibatan dari masyarakat untuk memberi pengaruh besar terhadap keberhasilan program yang dibuat. Partisipasi masyarakat menjadi modal utama dalam mencapai sasaran program pemerintah, keberhasilan program pemerintah tidak serta merta merupakan peran dari aparat pemerintah namun juga berkaitan dengan keinginan dan kemampuan dari masyarakat agar turut andil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari program yang dibuat. Program ini merupakan program pengembangan masyarakat yang dapat berjalan secara dinamis sesuai dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat, maka dari itu dibutuhkannya berbagai inovasi dan kerjasama antar pihak demi keberlangsungannya program tersebut.

Mengingat bahwa partisipasi masyarakat adalah faktor yang amat dibutuhkan pada pelaksanaan suatu program. Maka penting menurut saya untuk meninjau lebih dalam lagi agar dapat mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pada kendala partisipasi dimasa pandemi Covid-19 tersebut. Bagaimana cara membalik ketidakberdayaan dengan pemberdayaan. Penelitian ini juga sejalan

dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam yang mana Kelurahan Ciroyom mayoritas adalah masyarakat beragama islam yaitu sebanyak 15.964 jiwa dari jumlah keseluruhan 18.509 jiwa dan diharapkan dapat terus bermanfaat sebagai evaluasi dalam program pengembangan masyarakat islam dikedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat kelurahan Ciroyom dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK pada 4 tahap yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi beserta faktor pendukung dan penghambatnya yang dapat digunakan sebagai bahan masukan pada aspek partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PIPPK kedepannya. Saya merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai hal tersebut oleh karna itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19 Melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan** (Studi Deskriptif di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung).

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memiliki fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengambilan keputusan masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK?
2. Bagaimana pelaksanaan masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK?
3. Bagaimana pengambilan manfaat oleh masyarakat dari program penanganan Covid-19 melalui PIPPK?

4. Bagaimana evaluasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengambilan keputusan masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK.
3. Untuk mengetahui pengambilan manfaat oleh masyarakat dari program penanganan Covid-19 melalui PIPPK.
4. Untuk mengetahui evaluasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan bisa berperan sebagai rujukan dan juga masukan terhadap para pihak yang memiliki kepentingan atau akan melakukan penelitian serupa dikemudian hari. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi perihal peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau memperluas informasi kepada para pihak agen pemberdayaan masyarakat, juga pemerintahan Kota Bandung, khususnya aparat pemerintahan di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir, dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan evaluasi mengenai suatu program dan faktor munculnya partisipasi masyarakat. Terkhusus partisipasi masyarakat dalam mengatasi atau menangani pandemi Covid-19 melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

## E. Landasan Pemikiran

### 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Lili Mulyawati yaitu mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)” penelitian tersebut membahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Dengan hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dapat dianalisis dengan keempat bidang yakni dalam perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitiannya sama-sama membahas

mengenai partisipasi masyarakat disuatu wilayah melalui PIPPK. Namun terdapat perbedaan antara penelitian oleh Lili Mulyawati tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada program-program penanganan covid-19 melalui PIPPK, kemudian kedua penelitian ini juga memiliki tempat penelitian yang berbeda yaitu penelitian di Kelurahan Cipadung dan penelitian ini di Kelurahan Ciroyom Kota Bandung.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Firgina Amelia NH yaitu mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Sarana Sanitasi MCK” Studi di Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan sarana sanitasi dan kebiasaan masyarakat di Desa Cikadut yang masih menggunakan ruang terbuka untuk buang air. Dalam penelitian ini juga terdapat pemaparan upaya fasilitator atau pendamping dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar mengenai sanitasi dan kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (*research and development*) yakni penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektifitasnya. Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian sama-sama memiliki latar belakang dengan tujuan penelitian untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam

penanganan permasalahan yang ada. Perbedaannya terdapat pada permasalahannya yaitu mengenai Sanitasi dan Dampak Covid-19.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin dengan judul penelitian yaitu “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa di tanah karaeng kecamatan manuju di kecamatan gowa” penelitian tersebut membahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di tanah karaeng. Penelitian ini juga mengamati faktor apa saja yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dapat dianalisis dengan keempat bidang yakni dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hasil dengan menggunakan skala likert. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengukur tingkat partisipasi dengan 4 bidang yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hasil namun, Perbedaannya terdapat pada analisis data penelitian yaitu penelitian tersebut menggunakan skala likert yang dikemukakan oleh Nazir (2005) sedangkan penelitian ini berdasarkan metode yang dikemukakan oleh Emzir (2012) yaitu pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi, dan pengambilan kesimpulan.

## 2. Landasan Teoritis

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari istilah *participation*, yaitu keterlibatan atau peran dari setiap individu/kelompok masyarakat didalam suatu kegiatan,

baik dalam pembentukan, perencanaan, dan pelaksanaan, baik itu melalui pikirannya maupun melalui aktivitas fisiknya (Slamet 1994:7).

Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi merupakan keterlibatan seseorang maupun kelompok dalam proses saat pembuatan keputusan, saat pelaksanaan program, saat memperoleh kemanfaatan dan saat mengevaluasi program. Cohen dan Uphoff dalam (Astuti 2011:61-63) merumuskan partisipasi kedalam empat bagian yaitu :

- a. Partisipasi pada pengambilan keputusan yaitu berkaitan dengan penentuan keputusan bersama masyarakat melalui ide/gagasan dan juga berkaitan dengan mengacu pada kepentingan umum. Implementasi dalam partisipasi tersebut yaitu dengan cara menyalurkan atau menyumbangkan gagasan melalui forum rapat, pemberian pendapat ataupun argumen. Pada pengambilan keputusan, semua para partisipan memiliki hak yang sama untuk bersuara atau menyuarakan pendapatnya.
- b. Partisipasi pada pelaksanaan yaitu partisipasi yang meliputi usaha dalam menggerakkan sumber daya secara material misalnya penyaluran dana, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan, koordinasi serta penjabaran program. Partisipan dalam pelaksanaan yaitu ikut secara aktif dalam kegiatan ataupun program yang telah diputuskan sebelumnya.
- c. Partisipasi pada pengambilan manfaat yaitu partisipasi yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai

biasanya meliputi sisi kualitas (*output* kegiatan) ataupun kuantitas (presentase keberhasilan program).

- d. Partisipasi pada evaluasi yaitu berkaitan dengan program yang telah direncanakan, karena partisipasi bertujuan untuk mengetahui capaian suatu program yang telah dirancang dan telah direncanakan.

Menurut Sherry R. Anstein dalam (Sigit 2013:27) mengemukakan bahwa partisipasi dalam delapan bagian tingkat partisipasi dari tinggi kerendah diuraikan sebagai berikut:

- a. *Citizen control* yaitu masyarakat secara penuh berpartisipasi dalam mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan tersebut masyarakat berperan untuk mengatur program ataupun kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat memiliki wewenang serta dapat melaksanakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang akan melaksanakan perubahan. Ini merupakan upaya bersama warga yang terlibat langsung dalam dana tersebut untuk mendapatkan dukungan tanpa melalui pihak ketiga.
- b. *Delegeted Power*, pada tahap ini masyarakat diperbolehkan mengambil keputusan dalam suatu rencana tertentu dengan tujuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Pemerintah harus bernegosiasi dengan masyarakat dan tidak memberikan tekanan karena masyarakat mungkin memiliki kendali atas keputusan pemerintah.

- c. *Partner Ship*, masyarakat memiliki wewenang untuk mengambil keputusan ataupun pemerintahan atas kesepakatan bersama. kekuasaan dibagi antara masyarakat dan pemerintah sehingga dibuat kesepakatan dengan tanggung jawab masing-masing, termasuk perencanaan, pengendalian keputusan, perumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang dihadapi.
- d. *Placation*, Pemerintah perlu memilih sejumlah individu berdasarkan bagian warga yang ditentukan untuk berpartisipasi pada sebuah anggota badan publik, yang mana anggota tadi mempunyai akses eksklusif dalam aktivitas pengambilan keputusan. Meskipun pada pelaksanaannya setiap gagasan warga atau usulan warga tetap diperhatikan tetapi kedudukan partisipasinya relatif rendah & keanggotaannya lebih sedikit dibandingkan dengan pemerintah, Jadi pada tahapan ini warga tidak bisa merogoh keputusannya sendiri.
- e. *Consultation*, pada tahapan ini warga bukan hanya diberikan fakta saja melainkan diundang untuk menyebarkan pendapat walaupun pendapat tadi tidak jadi jaminan pada pertimbangan pengambilan keputusan. Metode yang umumnya dipakai merupakan berita umum tentang arah pemikiran warga ataupun pendapat dari warga.
- f. *Informing*, pada termin ini pemerintah hanya menaruh fakta pada masyarakat terkait program kerja yang dijalankan, warga

tidak dilibatkan untuk mempengaruhi *output* terkait dengan program kerja tersebut. Informasi yang diberikan bisa berupa hak, tanggung jawab & banyak sekali pilihan tetapi tidak terdapat *Feedback* ataupun kekuatan dalam negosiasi pada masyarakat. Warga hanya diberikan info pada tahapan akhir dari sebuah perencanaan program kerja & tidak mampu merubah ataupun mempengaruhi perencanaan tersebut.

- g. *Therapy*, pemerintah hanya berpura-pura melibatkan warga pada sebuah program, tujuannya yaitu untuk mengubah pola pikir masyarakat.
- h. *Manipulation*, hal ini merupakan tahapan yang paling rendah dari partisipasi, yang mana warga hanya digunakan sebagai namanya saja. Hal ini merupakan kegiatan manipulasi informasi dengan tujuan yaitu memperoleh dukungan publik dan dapat memberikan janji meskipun janji tersebut tidak akan pernah terjadi.

Melalui 8 tingkatan partisipasi tersebut selanjutnya dibagi menjadi 3 kelompok yang mana *manipulation* dan *therapy* merupakan bentuk dari masyarakat yang tidak dilibatkan dari partisipasi sedangkan dalam bagian *informing*, *consultation* dan *placation* merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam bentuk penerimaan ketentuan, dan selanjutnya *delegated power*, *partner ship* dan *citizen control* merupakan bentuk dari partisipasi penuh yang dilakukan oleh masyarakat.

### 3. Landasan Konseptual

#### a. Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada awal tahun 2020. Pandemi ini seakan datang secara tidak terduga. Jika dilihat dalam kajian Psikologi, kondisi ini dikenal sebagai peristiwa yang menekan dalam suatu kehidupan dan tergolong dalam non-normatif. Dalam peristiwa kehidupan non-normatif, digambarkan sebagaimana peristiwa yang signifikan, tidak terduga, dan tidak mengikuti pola perkembangan atau siklus kehidupan pada umumnya (Koulenti & Anastassiou-Hadjicharalambous, 2011).

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) ini disebabkan oleh virus SARSCoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) yang mengancam kesehatan warga dan telah berhasil menarik perhatian dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia internasional (Guner, Hasanoglu, & Aktas, 2020).

Berdasarkan data COVID-19 Republik Indonesia, per tanggal 17 Juni 2022, jumlah pasien total positif COVID-19 di dunia mencapai 535.248.141 orang, yang diakumulasikan dari pasien positif dirawat, pasien positif sembuh, serta pasien positif meninggal. Di Indonesia, total pasien positif COVID-19 sebesar 6.064.424 orang, dengan pasien sembuh sebesar 5.901.083 orang dan pasien meninggal sebesar 156.673 orang.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya Covid-19 sangatlah beragam, baik terdampak pada kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk melawan adanya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah akhirnya membatasi pergerakan masyarakat dalam bentuk pembatasan sosial dan karantina. Pada saat kebijakan pembatasan sosial dan karantina berjalan, negara harus memberikan jaminan bagi warga negaranya untuk tetap terpenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak untuk bebas dari kelaparan. berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat yang berada dalam karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit sesuai dengan prinsip pemenuhan hak asasi manusia.

b. Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK)

Pemerintah Kota Bandung pada masa pemerintahan Ridwan Kamil mengeluarkan program unggulan yaitu Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK). Program ini dalam penyelenggaraannya diharapkan mampu menggerakakan kembali keaktifan dari masyarakat terutama dalam membangun wilayahnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan adanya asas keterbukaan. PIPPK menjadi salah satu solusi ketika masyarakat memiliki masalah yang tidak diakomodasi dalam Musrenbang. PIPPK menyiapkan anggaran setiap tahunnya untuk digunakan pada pelaksanaan program-program yang dikelola langsung

oleh pihak yang bersinambungan langsung dengan masyarakat yaitu pada tingkat kewilayahan hal ini di jabarkan secara rinci pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

Program PIPPK didalamnya terdapat semangat kebersamaan, desentralisasi, dan mendorong kemampuan *leadership* aparatur sebagaimana senada dengan tujuan Bandung Empowerment City. Sasaran dari pelaksanaan program PIPPK adalah mewujudkan komitmen dan konsistensi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan pada masing-masing kelurahan di Kecamatan yang berorientasi kepada pembangunan masyarakat setempat dengan pendekatan berbagai inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif. (Alia & Maulana, 2019).

PeIaksanaan PIPPK ini diIaksanakan di daerah kewiIayahan. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai peIaksana teknis kewiIayahan yang mempunyai wiIayah kerja tertentu, sehingga PIPPK diIaksanakan diwiIayah kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Hal

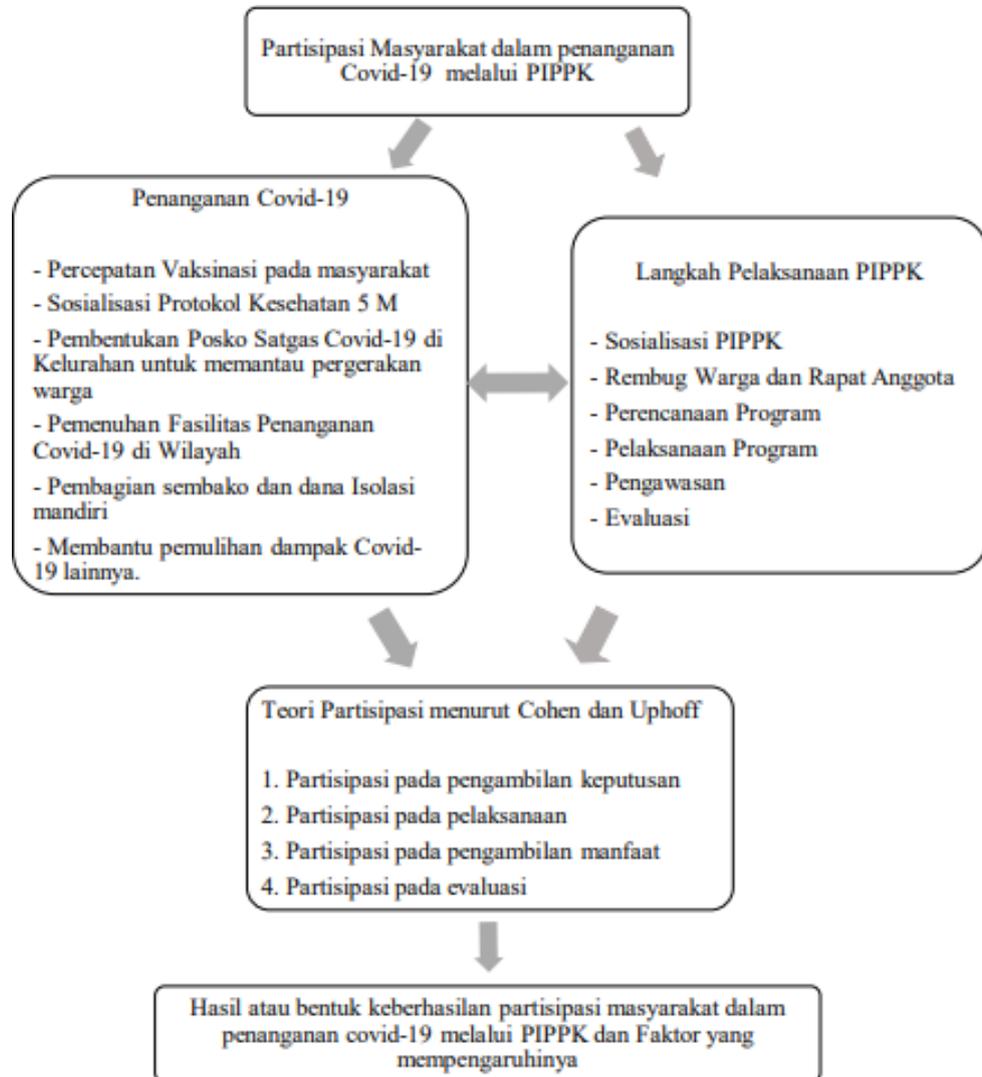
tersebut bermanfaat untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada tiap daerah.

Kenyataannya masyarakat kadang kala tidak memanfaatkan PIPPK ini sebagai peningkatan potensi dan kesejahteraan di wilayahnya, masyarakat cenderung kurang peduli dalam setiap pembangunan yang terjadi. Berdasarkan wawancara bersama Lurah Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung, ia mengatakan “tidak semua masyarakat mengetahui dan peduli dengan PIPPK, dan kita juga tidak dapat memaksa masyarakat untuk memahami program tersebut, karna kebanyakan masyarakat hanya akan melihat pada hasil yang berwujud. namun kita selalu berusaha mensosialisasikan program yang ada kepada masyarakat”.

Kondisi pandemi Covid-19 tentunya menimbulkan hambatan baru dalam pelaksanaan PIPPK, seperti bertambahnya aturan baru yang membatasi partisipasi masyarakat dan pelaksanaan programnya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program tersebut, yang mana dalam pelaksanaannya PIPPK tetap membutuhkan partisipasi dari masyarakatnya untuk keberlangsungan dan kesuksesan program yang akan dilaksanakan.

## 4. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1



Covid-19 melalui PIPPK yang khususnya dalam kegiatan partisipasi masyarakat yang akan di olah menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang selanjutnya akan menghasilkan bentuk keberhasilan partisipasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan kembali masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dikantor Kelurahan Ciroyom Jl. Ciroyom No.27, Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Dimana peneliti memilih lokasi tersebut karena dalam perlaksanaan observasi awal peneliti melihat keaktifan masyarakat dalam kegiatan dimasa pandemi Covid-19. Namun diwaktu yang bersamaan juga masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan new normal saat ini .

### **2. Paradigma dan Pendekatan**

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci

terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003:3). Lebih jauh, paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa. Menurut Patton dalam Jurnal Sri Hayuningrat (2010: 96-97) para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah *valid*, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut. Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa

dilakukan oleh kaum positifis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial (Eriyanto, 2012: 13).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy. J. Moleong mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2006: 233).

### 3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana menurut (Hikmat 2011) metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan informasi atau data secara deskriptif yang meliputi kata-kata yang tertulis ataupun yang tidak tertulis dari narasumber. Dengan demikian jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yang mana penelitian deskriptif adalah pengumpulan data dasar yang sifatnya menerangkan suatu hubungan untuk menjawab hipotesis dengan perencanaan yang disusun secara sistematis, akurat dan faktual.

### 4. Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana Bogdan dan Taylor berpendapat dalam (Moleong 2016) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengumpulkan data deskriptif seperti kata atau kalimat dari setiap perilaku individu yang diteliti.

Peneliti berharap dengan dipilihnya penelitian kualitatif dapat menghasilkan data yang objektif akurat dan menyeluruh sesuai dengan keadaan dilokasi penelitian. Jenis data dalam penelitian ini meliputi :

- Data mengenai kondisi di lokasi penelitian
- Data mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK
- Data mengenai strategi yang dilakukan oleh aparat kelurahan Ciroyom untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui PIPPK

Jenis data dalam penelitian ini bersumber pada individu, dokumen dan lain-lain. Jika dalam sebuah penelitian peneliti menggunakan kuesioner ataupun wawancara maka setiap narasumber yang menjawab pertanyaan penelitian didalamnya disebut juga sebagai sumber data (Kuswana:2011)

## 5. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Sehingga teknik yang digunakan oleh narasumber antara lain observasi dan wawancara dengan Lurah Ciroyom sebagai informan utama dan pihak-pihak yang berkontribusi di kelurahan Ciroyom sebagai informan kunci dan LKK sebagai informan pendukung.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan pustaka yang berkaitan dengan bahan penelitian seperti laporan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, dan disertasi).

6. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

a. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kelurahan Ciroyom, Kasi Pemerintahan Kelurahan Ciroyom, Ketua RW/RT di Kelurahan Ciroyom serta tokoh masyarakat, budaya dan agama setempat yang bersangkutan.

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan adalah teknik penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan hal hal tertentu dalam pengambilan sampelnya. Sedangkan *snowball sampling* adalah dari jumlah informan yang sedikit kemudian lama lama berkembang menjadi banyak dikarenakan kebutuhan informasi yang lebih spesifik serta lebih banyak. Mungkin dalam proses penelitiannya, penulis memerlukan informasi yang lebih dalam penelitiannya. Misalnya pada saat seorang informan dianggap tidak memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh penulis untuk itu penulis perlu informan lain untuk mendapatkan informasi yang ditargetkan.

Menurut Sugiyono kedua teknik penentuan informan ini termasuk kedalam kategori nonprobability sampling, dalam bukunya dituliskan bahwa “*Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a) Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan pencatatan dan pengamatan yang sistematis terhadap objek penelitian dan gejala-gejalanya, dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Observasi memiliki tujuan diantaranya pertama, dalam mengamati tingkah laku individu sebagai aktifitas yang aktual memungkinkan peneliti memiliki pandangan tingkah laku sebagai suatu proses, kedua, tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi sosial yang dapat diperoleh dengan cara lain, ketiga, tahapan ini juga berguna untuk mengeksplorasi data penelitian. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut peneliti mengamati lokasi penelitian secara langsung bagaimana kegiatan penanganan covid-19 melalui PIPPK di Kelurahan Ciroyom khususnya dalam bidang partisipasi.

#### b) Wawancara

Menurut Anas Sudiyono wawancara merupakan sebuah percakapan tanya jawab secara lisan maupun tulisan antara individu ataupun kelompok, jika wawancara tersebut dilaksanakan secara lisan biasanya wawancara dilakukan saling berhadapan dan pertanyaan wawancara biasanya diarahkan pada rumusan masalah yang sedang diteliti. Dalam tahapan ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak kelurahan Ciroyom yaitu lurah ciroyom bpk Moch.Agus Firmansyah, SIP., MM. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan RW Kelurahan Ciroyom selaku Informan dengan mengajukan pertanyaan, dan meminta keterangan terkait partisipasi masyarakat dalam penanganan covid-19 melalui PIPPK.

#### c) Studi Dokumentasi

Dewi Sadiyah (2015:91) berpendapat bahwa dalam tahapan ini proses pengumpulan data yang diperoleh dalam studi dokumentasi meliputi dokumen-dokumen baik dalam catatan, buku, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, laporan penelitian, jurnal, dan lain-lain. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan perbandingan atas kebenaran data dan informasi yang dihasilkan dalam penelitian.

### 8. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan proses triangulasi yang mana teknik tersebut menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2007:372) merupakan proses pengamatan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan jenjang

waktu, dengan demikian triangulasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu, Triangulasi sumber, Triangulasi pengumpulan data dan Triangulasi waktu. Dari ketiga jenis tersebut peneliti menggunakan keabsahan data dengan triangulasi sumber sebagai upaya peneliti untuk mengungkap serta menganalisis masalah penelitian, dengan demikian dalam teknik pengumpulan keabsahan data peneliti menggunakan metode *triangulasi observers*.

#### 9. Pengelolaan dan analisis data

Analisis data adalah penyederhanaan hasil dari penelitian kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami pada tahapan ini peneliti menggunakan analisis data berdasarkan dengan jenis data kualitatif yang dirumuskan oleh (Emzir 2012:129-133) sebagai berikut :

##### a) Pengumpulan data

Pelaksanaan pengumpulan data penelitian yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya peneliti menelaah dan membandingkan untuk memperoleh kebenaran dari setiap sumber .

##### b) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, pentransformasian, serta penyederhanaan abstraksi dari sumber data awal yang dilaksanakan saat pencatatan lapangan secara tertulis, tahap reduksi data dilaksanakan setelah observasi awal dilakukan karena dalam kegiatan obeservasi peneliti mendapatkan gambaran awal lokasi penelitian yang

selanjutnya peneliti memfokuskan penyederhanaan data pada rumusan dan tujuan masalah yang ingin dicapai.

c) Dikategorisasi

Peneliti menyusun data yang telah difokuskan kedalam kategori-kategori. Selanjutnya peneliti mengkategorikan data meliputi partisipasi, faktor-faktor dan strategi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penanganan covid-19 melalui PIPPK

d) Pengambilan kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari setiap aktivitas analisis dan penarikan verifikasi kesimpulan setelah data terkumpul secara lengkap untuk memudahkan peneliti dalam penguasaan data.

